



Peran Stakeholder dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Tania Saputri ^{1*}, Sujianto Sujianto ²

^{1,2} Universitas Riau, Indonesia

Alamat : Kampus Bina Widya KM.12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Korespondensi penulis : tania.saputri1304@student.untl.ac.id ^{1*}, sujianto@lecturer.unri.ac.id ²

Abstract. *The development of road and bridge infrastructure has an important role in increasing accessibility, economic growth and community welfare in rural areas. This study aims to analyze the role of stakeholders in the development of road and bridge infrastructure in Sanglar Village, Reteh District, Indragiri Hilir Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the main stakeholders in infrastructure development include local governments, communities and social institutions. Regional governments play a role in policy formulation, planning and budget allocation. The community participated in the deliberation and development monitoring process. The obstacles faced in development included budget limitations, challenging geographical conditions, as well as inadequate damaged road and bridge infrastructure. This research concludes that synergy between stakeholders is very necessary to increase the effectiveness of road and bridge infrastructure development. More targeted policies and increased community participation are needed at each stage of development so that the results achieved can be sustainable and in line with local needs.*

Keywords: *community participation, infrastructure development, roads and bridges, Role of stakeholders*

Abstrak. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan Masyarakat di daerah pedesaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder utama dalam Pembangunan infrastruktur ini meliputi pemerintah daerah, Masyarakat, serta lembaga sosial. Masyarakat turut serta dalam proses musyawarah dan pengawasan pembangunan, Adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, serta rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara stakeholder sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan agar hasil yang dicapai dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kata kunci: jalan dan jembatan, partisipasi Masyarakat, pembangunan infrastruktur, Peran stakeholder.

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan berdasarkan daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di kelompokkan atas Kabupaten dan Kota, yang setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu memiliki Pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur mengupayakan sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing

menjadi kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah daerah melakukan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah Undang-Undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah pusat. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain akan melangsungkan otonomi dan tugas pembantuan. Urutan dan tata cara pengelolaan Pemerintah daerah dibuat dalam Undang-Undang. Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik dibagi atas daerah-daerah dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dibentuknya suatu Desa juga diatur lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pasal 4 Undang Undang No 6 tahun 2014 salah satu isi dari pasal tersebut mencetuskan bahwa untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa harus dibantu suatu pembangunan nasional. Berkenaan hal yang meliputi Undang-Undang tersebut meliputi bidang pembangunan Desa. Dengan adanya pembangunan Desa sesuai pasal 78 dinyatakan bahwa utama dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan akan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan tujuan dan pembangunan Desa dinyatakan didalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun bagian dari pembangunan Desa adalah menyusun perencanaan, mewujudkan rencana, dan melakukan pengawasan, pembangunan infastruktur adalah bagian dari salah satu pembangunan Nasional setiap tahapan proses pembangunan harus selalu ada kebijakan tertentu dan pembangunanya pun harus menyeluruh untuk seluruh wilayah dan dilakukan bagi keperluan ataupun kepentingan masyarakat dapat betul-betul dirasakan efeknya dari perbaikan kenaikan taraf hidup semua masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan Desa keterbatasan infastruktur merupakan salah satu hambatan. Dengan infastruktur Desa yang terbatas seperti minimnya akses jalan menuju persawahan atau perkebunan, jembatan antar Desa tidak memadai, irigrasi yang kurang memadai sehingga masyarakat Desa tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. (Moejiarto. 2007) dalam Deibby K. (Pangkey, 2016).

Pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang penting pada Desa dimana, pembangunan dimaksudkan ialah adanya prasarana dari pelayanan publik seperti: jalan, listrik, air bersih dan jembatan, tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, masjid, transportasi, dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah menjalankan yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Untuk memajukan Masyarakat agar berpartisipasi terhadap pembangunan, maka dari itu dibutuhkan dengan adanya tenaga atau unsur penggerak yang dapat mendorong dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk merealisasikan dalam pembangunan dan dalam hubungan ini stakeholder sebagai penguasa tertinggi dan penanggung jawab pelaksana Pemerintah dan pembangunan harus mampu menjalankan tugasnya yang telah di berikan. (Effendi, 2002) dalam siboro (Siboro, 2022).

Pemerintah Desa yang merupakan salah satu bagian dari stakeholder menyusun pembangunan Desa sesuai atas kewenangan dengan mengacu pada perencanaan penyusunan pembangunan Kabupaten atau Kota. Penyusunan dan pembangunan infrastruktur Desa juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang mengikutsertakan masyarakat Desa bisa melakukan pemantauan secara langsung mengenai pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam menjalankan peran pembangunan Desa. Stakeholder memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggung jawab terhadap tercapainya pembangunan Desa yang sangat penting, karena posisinya sebagai pejabat yang memegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berwenang atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menerima aspirasi Masyarakat, serta melindungi Masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu sendiri. (Sugiman, 2018)

Pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sanglar ini sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah Desa akan tetapi karena minimnya dana dari pemerintah pusat dan juga harus terbagi bagi untuk perbaikan jalan Desa lain. Pembangunan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan dengan lancar, karena masyarakat berpendapat bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah Desa, tapi pada kenyataannya pemerintah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan tanpa adanya keikutsertaan Masyarakat untuk melakukan pembangunan secara bersama-sama.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa tersebut terdapat jalan yang rusak parah untuk di lintasi, dari dampak buruknya jalan di Desa Sanglar mengakibatkan warga Desa lain pun merasakan dampak dan kesulitan akan kenaikan harga sembako seperti beras dan gula, dikarenakan akses jalan menuju Desa Sanglar sulit sehingga barang- barang sembako juga ikut naik harganya. Dikecamatan Reteh selalu diprioritaskan dari tahun 2019-2024 karena memiliki kondisi jalan yang sangat parah diantara kecamatan lainnya, adapun hambatan dari kerusakan

jalan ada 3 faktor yang pertama ada faktor dana yaitu keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk proyek infrastuktur sering kali menghambat pelaksanaan tanpa pendanaan yang cukup, proyek tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana. Yang kedua yaitu faktor alamiah dengan kondisi geografis yang tidak menentu seperti banjir dan faktor tanah yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini mengakibatkan perlunya teknik kontribusi yang khusus dan bahan yang lebih tahan lama, sehingga memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembagunan ditanah yang lebih stabil, keterbatasan dana yang tersedia sering kali menjadi penghambat dalam penyelesaian proyek jalan. Yang ketiga rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan yang mengakibatkan sulitnya mobil untuk mengirimkan bahan material ke Desa Sanglar. Dan setiap jalan yang rusak adalah tanggung jawab dinas PUPR kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengatasi jalan yang rusak ini yaitu pemerintah Kabupaten dalam hal ini merupakan kewenangan dinas PUPR. Tugas dan fungsi dinas PUPR salah satunya termasuk yang menangani pembangunan jalan dan jembatan jalan tersebut termasuk pada jalan Kabupaten yang terdiri dari jalan kolektor primer tidak termasuk jalan Nasional dan jalan Provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan. Ibukota Kabupaten dengan Pusat Desa dan antar Desa. Jalan sekunder yang tidak termaksud pada jalan Provinsi dan Jalan Skunder dalam Kota. Ruas-Ruas jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Fenomena jalan buruk di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini bukan hanya jalannya saja yang rusak parah tetapi juga banyak sejumlah jembatan yang sulit untuk di lewati dan mengakibatkan warga yang ingin melintas disana harus sangat berhati-hati karena disebabkan jembatan yang menggunakan kayu dan papan. Banyak warga yang mengeluh dan mengatakan bahwa bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat saja namun juga dapat membahayakan pengguna jalan yang ingin melintas disana. Hampir sebagian besar seluruh jembatan yang ada didaerah Kecamatan Reteh itu rusak dan hanya bermodalkan kayu dan batang kelapa saja, banyak korban yang terkena dampak dari rusaknya jalan dan jembatan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi peran secara etimologis adalah yang melakukan suatu Tindakan dalam situasi yang diharapkan orang lain. Artinya, setiap Tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki arti penting untuk Sebagian orang. Peran didefinisikan sebagai seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi

apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.

Menurut Koizer Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di Masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang dimata Masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan Masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Teori peran stakeholder dalam Soerjono Soekanto peran didefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Stakeholder merupakan pimpinan penyelenggaran Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan bersama badan permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholder sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah Desa akan karena stakeholder yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh Masyarakat Desa. Stakeholder harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Fungsi Stakeholder adalah untuk mewujudkan dan melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Stakeholder pun bertugas sebagai sosial ekonomi, lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang tercantum pada Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang Desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintah Desa dan memperdayakan Masyarakat Desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Perangkat Desa di Indonesia adalah aparatur pemerintah yang berada langsung diposisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan Nasional maupun kebijakan Daerah. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Perangkat Desa di Indonesia disebut dengan birokrat garda terdepan. Menurut

Purwanto dan Sulistyastuti, tercapainya tujuan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja para Birokrat garda terdepan. Hal ini karena dari keseluruhan proses implementasi kebijakan, Birokrat garda terdepan menempati posisi paling akhir yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan, atau pekerjaan, atau tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan pada hakikatnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya haruslah melibatkan masyarakat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang tinggal dipertanian maupun Pedesaan (Ety Rahayu) dalam Raharjo 2021. Menurut Wrihatnolo dan Dwisjowijoto, dalam konsep pertumbuhan, pemanfaatan pembangunan adalah Rakyat pada level akar rumput. Maka dari itu, penerapan konsep pemberdayaan masyarakat akan mampu menjawab tantangan melaksanakan distribusi pembangunan secara lebih baik. Dalam perkembangan selanjutnya konsep ini akan dikenal sebagai *distribution with growth*.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakatnya. Beragaman dari usaha berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh Masyarakat terutama Masyarakat di pedesaan. Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan Masyarakat di pedesaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Karena untuk mendapatkan pemahaman serta fakta yang terjadi dilapangan mengenai peran stakeholder dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan observasi dan wawancara yang mendalam terhadap informan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokus kantor Desa Sanglar. Alasan mengambil lokasi penelitian di Desa Sanglar yaitu Desa Sanglar salah satu Desa yang memiliki jalan buruk di antara Desa-Desa yang besar di Kecamatan Reteh dan Desa Sanglar atau lebih tepatnya Kecamatan Reteh selalu menjadi prioritas utama untuk perbaikan jalannya akan tetapi faktor

alamiah lah yang membuat jalan di sana tidak pernah bagus dan sampai sekarang hanya ada seminisasi jalan setiap tahunnya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sanglar, Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Rukun Warga (RW) Lurus, Rukun Warga (RW) Getah, Karang Taruna, dan Masyarakat Desa Sanglar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Aspek dinamis dari kedudukan itu maksudnya bagaimana suatu posisi atau peran bisa berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan, Aspek dinamis dari kedudukan Masyarakat sangat penting dalam konteks pembangunan infrastruktur. Kedudukan ini tidak tetap, peran Masyarakat bisa berubah seiring dengan perkembangan dan kebutuhan Desa. Pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan Lembaga swadaya Masyarakat, memainkan peran penting dalam proses ini.

Misalnya, jalan yang baik dapat meningkatkan akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan, sementara jembatan yang kokoh memudahkan perjalanan antar Desa. Dengan mengetahui hal ini, Masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun Sebaliknya, penting bagi stakeholder untuk mengkomunikasikan dengan baik. Seseorang dapat segera menemukan solusi dari masalah tersebut dengan memulai diskusi secara terbuka dari masukan maupun kritikan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara Peneliti dengan Kepala Desa.

”Sebagai Kepala Desa, saya memegang tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jalan dan jembatan di desa kami. Dalam menjalankan tugas ini, saya rutin menjalin komunikasi langsung dengan pihak kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa dana dan bantuan yang dibutuhkan bisa segera diperoleh. Saya juga menjalin kerja sama yang erat dengan perangkat desa, BPD, serta para ketua RW dan RT. Tujuannya agar aspirasi dan masukan dari masyarakat bisa didengar dan segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan benar benar bisa menjawab kebutuhan warga. Kami percaya bahwa dengan adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak, proses pembangunan dapat

berjalan lancar dan hasilnya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat.”(Wawancara dengan Kepala Desa Sanglar Sanglar, Bapak Alfian T pada hari rabu 6 November 2024)”

Perangkat hak dan kewajiban itu aturan yang menentukan apa yang boleh dan harus dilakukan oleh setiap orang atau kelompok dalam Masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sanglar, semua pihak yang terlibat, seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Kontraktor, punya hak dan kewajiban masing-masing. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik dari segi lokasi, kualitas, maupun manfaatnya ke depan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama untuk mengoordinasikan setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pengusulan, hingga pengawasan di lapangan. Kepala Desa harus memastikan pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya sebatas proyek fisik, tetapi juga mampu meningkatkan akses, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga harus mengelola anggaran dengan transparan dan bekerja sama dengan semua pihak supaya pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.. Berikut dibawah ini hasil wawancara Peneliti bersama Kepala Desa:

“Sebagai Kepala Desa, saya juga terlibat langsung di lapangan untuk memantau proses seminisasi yang dilakukan setiap tahun. Kami terus berusaha agar perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan akses dan kenyamanan masyarakat, meskipun perbaikan secara menyeluruh belum bisa terlaksana karena keterbatasan dana. Kami berharap pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan warga dengan pengawasan yang baik”. (Wawancara bersama Bapak Alfian T selaku Kepala Desa Sanglar, pada hari Rabu 6 November 2024)”

Perilaku actual dari pemegang kedudukan mencerminkan bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani Masyarakat. Jika para pemimpin Desa bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka pembangunan Desa, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga. Namun, jika ada sikap kurang peduli atau hanya menjalankan tugas seadanya, maka pembangunan bisa terhambat dan tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, peran Stakeholder seperti Pemerintah daerah, swasta, dan Masyarakat sangat penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Dalam hal ini, peran individu yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alfian T sebagai kepala Desa Sanglar:

“Saya sering langsung datang ke lokasi buat liat sendiri gimana proses pengerjaan jalannya, sekalian ngecek juga apakah bahan yang dipakai emang bagus dan tahan lama. Tapi karena anggaran kita terbatas, ya kita belum bisa ngerjain perbaikan jalan di Desa Sanglar secara keseluruhan. Jadi untuk sekarang, kita cuma bisa ngerjain sedikit-sedikit tiap tahun, biar jalannya tetap bisa dipakai warga dengan nyaman. Saya juga selalu ngobrol dan kerja bareng sama perangkat desa dan yang lainnya, supaya setiap perbaikan yang kita lakuin itu sesuai rencana dan bener-bener berguna buat masyarakat..” Wawancara bersama Bapak Alfian T selaku Kepala Desa Sanglar, pada hari rabu 6 November 2024)”

Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang dalam pembangunan adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Setiap pihak, mulai dari Perangkat Desa, Pemerintah Daerah, hingga Masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan proyek ini sukses. Perangkat Desa bertugas untuk merencanakan dan mengawasi pembangunan, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dan kebijakan yang mendukung, aktif Masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan serta jembatan yang sudah dibangun juga sangat penting agar tidak cepat rusak dan tetap dapat digunakan dengan nyaman. Semua pihak harus saling mendukung, bekerja sama, dan terus berkomunikasi agar setiap tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang erat antara Pemerintah Desa, Pemerintah Masyarakat, pembangunan infrastruktur di Desa Sanglar diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, menciptakan Desa yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sanglar yaitu Bapak Alfian T:

“Sebagai Kepala Desa, tanggung jawab utama saya dalam perbaikan jalan dan jembatan adalah memastikan semuanya berjalan lancar tanpa boros anggaran. Saya selalu berusaha mengelola dana dengan bijak supaya perbaikan tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, kami sering melibatkan warga dalam kerja bakti untuk menekan biaya, seperti gotong royong memperbaiki jalan yang rusak ringan. Dengan cara seperti ini, kami bisa terus memperbaiki infrastruktur Desa, supaya warga bisa beraktivitas dengan lebih nyaman meskipun anggarannya terbatas.” (Wawancara bersama Bapak Alfian t selaku Kepala Desa Sanglar, pada hari rabu 6 November 2024)

Faktor Penghambat Peran Stakeholder Dalam Pembagunan Infrastruktur Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Minimnya anggaran dana di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sudah menjadi masalah yang cukup serius bagi Stakeholder dan Masyarakat setempat, dengan dana Desa yang terbatas menjadi salah satu penyebab utama kesulitan dalam memperbaiki

infrastruktur di Desa. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Alfian T mengenai minimnya anggaran dana di Desa Sanglar: “Dalam wawancara dengan Kepala Desa Sanglar menyampaikan bahwa minimnya anggaran di Desa saat ini disebabkan oleh terbatasnya dana dari pemerintah pusat, yang harus dibagi ke banyak desa lainnya. Akibatnya, dana yang masuk ke Desa Sanglar nggak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan pelayanan, terutama karena jumlah penduduk juga makin bertambah, beliau bilang banyak program yang sudah diajukan oleh Desa akhirnya nggak bisa terlaksana karena dana yang tersedia memang terbatas. Maka dari itu, Desa harus pintar-pintar cari solusi, supaya anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat luas.” (Alfian T, Kepala Desa Sanglar Rabu 6 November 2024, jam 9:25 WIB).

Faktor alamiah seperti kondisi geografis yang tidak menentu dan banjir yang hanya terjadi sesekali, biasanya saat air laut pasang hal ini terjadi pada musim tertentu ketika hujan turun deras. Masyarakat sering kali harus bersiap-siap menghadapi banjir yang datang tiba-tiba, tetapi tidak setiap waktu jadi meskipun banjir bisa mengganggu itu bukanlah hal yang terus menerus. Sekarang yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur yaitu jalan, yang menyebabkan genangan air dan kerusakan pada jalan yang ada, selain itu juga karakteristik tanah yang bervariasi, seperti tanah gambut memiliki sifat yang mudah menyerap air sehingga dapat menyebabkan masalah seperti penurunan permukaan tanah dan ketidakstabilan.

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa tentang faktor alam yang tidak mendukung: “Dalam wawancara bersama Kepala Desa menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor alam yang cukup menghambat perkembangan Desa. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kondisi geografis Desa yang rawan banjir karena pasang surut air laut. Hal ini sering bikin warga kesulitan, terutama saat ini berpergian karena jalanan bisa tergenang atau sulit dilewati. Selain itu, struktur tanah di beberapa bagian Desa juga kurang stabil, sehingga bikin pembangunan infrastruktur jadi lebih rumit dan sulit untuk dibuat kuat dan tahan lama. Meskipun begitu Kepala Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa nggak tinggal diam saja. Mereka terus berusaha mencari solusi, baik lewat kerja sama dengan pihak-pihak terkait maupun dengan mengajak masyarakat buat bisa lebih beradaptasi dengan kondisi alam yang ada. Harapannya, walaupun ada tantangan dari sisi lain alam, pembangunan di Desa tetap bisa berjalan lancar demi kebaikan dan kesejahteraan semua masyarakat.” (Alfian T, Kepala Desa Sanglar, Rabu 6 November 2024, jam 10:15 WIB)”.

Di Kecamatan Reteh, perhatian khusus telah diberikan sejak tahun 2019 hingga 2024, mengingat kondisi jalan yang sangat parah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Infrastruktur jalan yang buruk telah menjadi tantangan besar bagi Masyarakat Desa Sanglar menghambat aksesibilitas dan mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan mulai dilakukan, dengan prioritas yang lebih tinggi untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Program-program pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup Warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan daerah. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan Masyarakat, diharapkan kondisi jalan di Desa Sanglar akan membaik dan membawa dampak positif bagi seluruh warga.

Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Alfian T: “Kondisi jalan yang rusak memberikan dampak besar bagi kehidupan Masyarakat, terutama disektor pertanian, jalan yang sulit dilalui membuat pengangkutan hasil panen jadi terhambat dan proses menuju pasar jadi lebih lambat. Karena akses ke jalan dan jembatan terbatas, banyak barang harus transit dulu di beberapa tempat, yang akhirnya bikin biaya distribusi naik dan harga barang pokok jadi lebih mahal, padahal salah satu cara penting untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat adalah dengan punya akses jalan yang bagus bisa mempercepat distribusi barang, dan mempermudah aktivitas antar wilayah.”(Alfian T, Kepala Desa Sanglar, Rabu 6 November 2024, jam 11:53 WIB)”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran stakeholder dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa Stakeholder Desa Sanglar, masih menghadapi keterbatasan dana dalam merealisasikan pembangunan jalan secara keseluruhan. Oleh karena itu, saat ini pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap melalui semenisasi setiap tahunnya. Masyarakat diharapkan untuk bersabar serta turut berperan aktif dalam mencari solusi agar pembangunan infrastruktur di Desa tersebut dapat segera terlaksana di tahun yang akan datang.

Sementara itu, faktor penghambat Peran Stakeholder dalam pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: Minimnya anggaran dana Desa Sanglar mengakibatkan pembagunan berjalan secara bertahap, Faktor alam yang tidak mendukung sehingga membutuhkan biaya banyak untuk pembangunan infrastruktur, Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mengakibatkan Masyarakat sulit beraktivitas.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, P. M. (2022). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Universitas Batanghari.
- Berlin, Y., & Noor, I. (2014). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *JAP*, 3(1), 67.
- Harun, R., Rachman, E., & Antu, Y. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal of Global and Multidisciplinary*, 1, 598–604. <https://journal.institercom.edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom.edu.org/index.php/multiple>
- Hikmat, H. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press.
- Ndraha, T. (2005). Teori Budaya Organisasi. PT. Rineka Cipta. Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Pustaka Karya.
- Pangkey, D. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahman Hakim, A., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1111–1124.
- Siagian, S. P. (2005). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi. Bumi Aksara.
- Siboro, R. H. (2022). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Universitas Medan Area.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudriamunawar, H. (2002). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandar Maju.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum.
- Tjokrowinoto, M. (2007). Pembangunan Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar.
- Wawan. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Riau.